



## Sistem Penjaminan Mutu Internal di SMP/MTs : Kajian Literatur Tentang Konsep dan Implementasi

Friska Ayu Nur Rabani<sup>1</sup>, Ananda Annisa Amalia<sup>2</sup>, Cindy Aprilia Ratnasari<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

Jl. Lidah Wetan, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, kota Surabaya, Jawa Timur  
Korespondensi penulis: [friska.21085@mhs.unesa.ac.id](mailto:friska.21085@mhs.unesa.ac.id)

**Abstract.** *This study explores the implementation of the Internal Quality Assurance System (IQAS) at the junior high school level (SMP/MTs) through a literature review. The research aims to analyze the application of IQAS in achieving the Eight National Education Standards (NES). A qualitative descriptive method was employed, utilizing a literature study approach and data sourced from relevant journals, books, and policy documents. The findings indicate that implementing IQAS positively impacts the quality of learning and school management, supported by factors such as school leadership, stakeholder collaboration, and the availability of infrastructure. However, challenges remain, including limited understanding among educators and staff, inadequate facilities, and insufficient financial support. The study concludes that the success of IQAS implementation relies on the collaboration of all stakeholders and continuous evaluation. Recommendations include enhancing awareness of IQAS, strengthening human resource capacity, and optimizing the use of infrastructure.*

**Keywords:** *Quality Assurance; Education; Secondary Schools.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat SMP/MTs melalui kajian literatur. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji implementasi SPMI dalam mencapai delapan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, memanfaatkan sumber data dari jurnal, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPMI memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pembelajaran dan pengelolaan sekolah, yang didukung oleh faktor-faktor seperti kepemimpinan kepala sekolah, kerja sama antar pemangku kepentingan, dan ketersediaan sarana prasarana. Meski demikian, masih terdapat tantangan seperti kurangnya pemahaman tenaga pendidik dan kependidikan, keterbatasan fasilitas, serta minimnya dukungan dana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pelaksanaan SPMI bergantung pada kolaborasi seluruh pihak yang terlibat dan evaluasi secara berkelanjutan. Adapun rekomendasi yang diajukan meliputi peningkatan pemahaman tentang SPMI, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan sarana prasarana secara optimal.

**Kata Kunci:** Penjaminan Mutu; Pendidikan; SMP/Mts.

### 1. LATAR BELAKANG

Pendidikan sejalan dengan tujuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menetapkan bahwa pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan merupakan upaya terencana dan sadar untuk membuat lingkungan belajar yang memungkinkan siswa mengembangkan potensi terbaik mereka melalui pengembangan potensi setiap orang. Sistem penjaminan mutu pendidikan menggunakan Standar Nasional Pendidikan yang disingkat (SNP), yang terdiri dari delapan komponen utama antara lain standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan juga penilaian. SPMI sendiri bertujuan untuk memastikan bahwa semua proses pendidikan dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan, dan Permendikbud No. 28

Tahun 2016 menetapkan SNP sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan.

Namun di kenyataannya masih terdapat tantangan besar dalam menciptakan budaya mutu di lingkungan pendidikan (Suradnya, 2021). Tantangan tersebut menjadi kendala dalam mencapai SNP. Beberapa masalah utama mencakup rendahnya kualitas proses pembelajaran, terbatasnya kompetensi pendidik, kurangnya fasilitas, serta lemahnya sistem evaluasi mutu pendidikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal. SPMI menjadi pendekatan strategis yang mengintegrasikan kebijakan, proses, dan organisasi untuk meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Implementasi ini dilakukan untuk membangun budaya mutu di lingkungan sekolah yang mencakup seluruh aspek pendidikan, mulai dari input, proses, hingga output (Toliu et al., 2022). Namun pada kenyataannya masih terdapat tantangan besar dalam menciptakan budaya mutu di lingkungan pendidikan.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan prioritas utama bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pendidik, pemerintah, dan lembaga pendidikan. Tantangan yang dihadapi sistem pendidikan Indonesia termasuk kualitas lulusan yang rendah, pembelajaran yang tidak sesuai standar, kekurangan sumber daya atau sarana prasarana, serta kualitas kepemimpinan sekolah yang belum optimal, menuntut penerapan kebijakan strategis untuk memastikan kualitas pendidikan yang lebih baik. Implementasi penjaminan mutu menjadi langkah penting yang diambil sebagai upaya sistematis untuk menjawab tantangan tersebut (Warta et al., 2024).

Implementasi SPMI di tingkat SMP dan MTs melibatkan serangkaian tahap, yaitu pemetaan mutu pendidikan melalui evaluasi diri, penyusunan rencana pemenuhan mutu berbasis hasil pemetaan, pelaksanaan rencana tersebut, serta evaluasi dan monitoring keberhasilannya. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan SPMI memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan hasil pendidikan. Penerapan SPMI di SMP, seperti yang diteliti oleh (Allo et al., 2022), menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi bergantung pada peran aktif TPMPS, atau Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah. TPMPS ini bertanggung jawab atas evaluasi diri, perencanaan perbaikan mutu, pelaksanaan program mutu, dan evaluasi kinerja mutu. Selain itu, penelitian oleh (Sukaryanti, 2020) juga menekankan pentingnya untuk mencapai tujuan, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan diharapkan bekerja sama untuk menjalankan SPMI budaya mutu yang berkelanjutan.

Dengan demikian, SPMI tidak hanya menjadi alat untuk memenuhi SNP tetapi juga membangun budaya mutu di sekolah. Ini memerlukan kerja sama seluruh warga sekolah untuk memastikan bahwa mutu pendidikan yang dihasilkan relevan dengan tantangan global. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam implementasi SPMI di SMP/MTs, khususnya dalam konteks pencapaian delapan SNP. Dengan memahami langkah-langkah strategis, hambatan, dan pendukung dalam pelaksanaan SPMI, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi atau efektivitas dari penjaminan mutu pendidikan di sekolah menengah.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Menetapkan dan memenuhi standar kualitas dalam pengelolaan pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan dikenal sebagai penjaminan kualitas pendidikan. Proses penjaminan kualitas ini mencakup serangkaian tindakan terencana yang dilakukan secara sistematis bersama dengan bukti yang mendukung untuk memastikan bahwa suatu organisasi dapat dianggap berkualitas. Setiap sekolah dasar dan menengah bertanggung jawab untuk menerapkan penjaminan mutu internal melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (Supadi, 2020).

Menurut Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah (SPMI), sistem ini bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan di tingkat satuan pendidikan dan mencakup semua komponennya. Untuk menjamin kualitas pendidikan, sistem ini diterapkan di semua sekolah dasar dan menengah. Di sekolah dasar dan menengah, siklus penjaminan mutu terdiri dari lima tahap: pemetaan mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP), pembuatan rencana peningkatan, pelaksanaan pemenuhan, pengawasan dan evaluasi pemenuhan, dan pengembangan strategi peningkatan (Kemdikbud, 2016).

Implementasi SPMI melibatkan tahapan evaluasi diri, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang membentuk siklus perbaikan terus-menerus (Pamelanintyas, 2019). Keberhasilan SPMI dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah, kolaborasi stakeholder, dan ketersediaan sarana prasarana yang memadai. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman staf dan keterbatasan fasilitas masih menjadi hambatan utama dalam penerapannya (Prasetya et al., 2022). Oleh karena itu, sinergi antara seluruh pihak diperlukan sebagai optimalisasi implementasi SPMI untuk mencapai mutu yang berkualitas di Indonesia.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi literatur (*literature review*), yang bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penjaminan mutu internal di tingkat SMP/MTs. Tulisan ini menjabarkan berbagai informasi terkait konsep dasar, faktor pendukung, hambatan, dan langkah implementasi SPMI berdasarkan hasil kajian dari berbagai sumber terpercaya. Data yang digunakan berasal dari jurnal ilmiah, buku referensi, laporan penelitian, dokumen resmi pemerintah.

Data yang diperoleh pada tulisan ini dengan cara mencari literatur pada sumber daring yang kredibel, seperti Google Scholar dan jurnal nasional terindeks. Literatur yang dipilih mengacu pada kriteria relevansi dengan topik penelitian, tingkat kredibilitas sumber, dan batas waktu publikasi dalam 10 tahun terakhir. Informasi yang terkumpul direduksi untuk memfokuskan pembahasan pada aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan SPMI di SMP/MTs.

Setelah perolehan data maka data direduksi untuk memilih informasi yang relevan dan penting tentang subjek. Kemudian, data disajikan secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang luas, dan penarikan kesimpulan dilakukan untuk membuat gambaran umum dan memberikan saran yang relevan berdasarkan temuan literatur. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai implementasi SPMI di SMP/MTs serta memberikan saran praktis dalam peningkatan mutu sekolah.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Konsep Dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**

SPMI yang dikenal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal merupakan salah satu jenis dari sistem mutu yang diterapkan pada jenjang tertinggi lembaga pendidikan dan dilaksanakan oleh seluruh komponennya. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2016 menyatakan bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Dasar dan Menengah adalah subsistem yang terdiri dari prosedur dan kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan mutu pendidikan dengan tujuan agar peserta didik memperoleh pendidikan yang bermutu berdasarkan bahkan lebih dari Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan. Menurut (Labakkang & Allo, 2024) , SPMI merupakan sistem yang membantu sekolah memastikan mutu siswa sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Salah satu pendekatan pendidikan yang menganut SNP yang telah ditetapkan

pemerintah adalah SPMI. Pemangku kepentingan yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan disebut sebagai satuan pendidikan, dan satuan pendidikan harus berpegang pada SNP. Sebagaimana dinyatakan pada ayat (1), SPMI-Dikdasmen SPMI disusun, dilaksanakan, dievaluasi, dan dikembangkan oleh setiap lembaga pendidikan formal dasar dan menengah (Kemdikbud, 2016). (Pamelanintyas, 2019) menguraikan implementasi menggunakan teori Charles O. Jones yang memiliki tiga komponen: organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Implementasinya dilakukan melalui seperangkat pedoman yang mencakup Evaluasi Diri Sekolah, Rencana Kerja Sekolah, melalui pemantauan, penerapan, dan evaluasi standar baru. Berikut penjelasan tahapan implementasi SPMI :

A. Evaluasi Diri Sekolah (EDS)

Proses di mana sekolah menilai dirinya sendiri. Guru, kepala sekolah, dan pihak terkait lainnya menilai sekolah dari berbagai sudut pandang, seperti pembelajaran, fasilitas, dan kepemimpinan.

B. Perencanaan Rencana Kerja Sekolah (RKS)

RKS merupakan dokumen yang dibuat setelah EDS. RKS menetapkan tujuan sekolah dan strategi untuk meningkatkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan. RKS biasanya dibuat untuk jangka waktu tertentu dan mencakup program yang akan dilakukan.

C. Penerapan (Pelaksanaan)

Pada tahap ini, semua rencana yang sudah dibuat di RKS dijalankan. Untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik, sekolah harus melibatkan semua orang, seperti guru, siswa, orang tua, dan komite sekolah. Penerapan harus dilakukan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

D. Monitoring

Monitoring adalah proses memantau pelaksanaan RKS. Sekolah memastikan bahwa semua program berjalan sesuai rencana dan mencari solusi segera jika ada masalah.

E. Evaluasi

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah program telah mencapai tujuannya atau tidak. Pada titik ini, sekolah mengevaluasi apa yang berjalan baik sesuai rencana dan apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi ini biasanya dilakukan secara berkala.

F. Penetapan Standar Mutu Baru Sekolah

Menetapkan standar baru berdasarkan hasil evaluasi. Ini berfungsi sebagai referensi untuk langkah selanjutnya. Proses ini memastikan bahwa sekolah terus berkembang dan menyediakan layanan yang lebih baik.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki tujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah berjalan sesuai standar, sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Tujuan dari sistem ini adalah menjamin terpenuhinya standar pendidikan di setiap satuan pendidikan secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan, sehingga tercipta budaya mutu yang berkembang secara mandiri di setiap satuan pendidikan. (Dewi & Anwar, 2022) mengungkapkan bahwa SPMI merupakan pendekatan sistematis dan terpadu untuk memastikan proses pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta mampu memenuhi atau melampauinya. Untuk menggapai SNP, sistem mutu pendidikan telah dikembangkan untuk pendidikan dasar dan menengah. Sistem mutu pendidikan diimplementasikan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa mutu pendidikan dapat dilaksanakan di semua tingkat sekolah dasar dan menengah (Kemdikbud, 2016).

### **Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP/MTs**

Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di sekolah menengah pertama dan madrasah tsanawiyah merupakan langkah penting dalam memastikan kualitas lembaga atau sekolah. Analisis ini akan membahas penerapan SPMI di tiga jenis sekolah: satu SMP negeri, satu SMP Islam, dan satu SMP swasta

#### **1. Konsep dan Kerangka SPMI**

SPMI adalah sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan mampu memenuhi dan melampaui SNP. Fungsinya meliputi pengelolaan mutu secara terstruktur dan berkesinambungan. Proses implementasi SPMI dilakukan melalui siklus yang terdiri dari lima tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu (PPEPP). Siklus ini memungkinkan sekolah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan berdasarkan kebutuhan dan hasil evaluasi sebelumnya (Ula et al., 2021).

#### **2. Implementasi di SMP Negeri**

Pada SMP Negeri 3 Watansoppeng, implementasi SPMI mengikuti lima tahapan utama (Asriadi, 2022), yaitu :

- a) Penetapan Standar: Sekolah merumuskan standar mutu sesuai regulasi pemerintah dan kebutuhan lokal.
- b) Pemetaan Mutu: Dilakukan evaluasi untuk mengenali kekuatan dan kelemahan dalam memenuhi standar.
- c) Rencana Pemenuhan Mutu: Disusun strategi untuk mencapai standar yang telah ditetapkan.
- d) Pelaksanaan Pemenuhan Mutu: Rencana diterapkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- e) Evaluasi dan Pengendalian: Penilaian berkala dilakukan untuk mengidentifikasi pencapaian dan melakukan perbaikan.

Keberhasilan pelaksanaan di SMP Negeri ini didukung oleh fasilitas yang memadai, peran kepala sekolah, dan komitmen tim mutu. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman guru tentang SPMI dan keterbatasan waktu untuk menjalankan semua tahapan dengan maksimal masih menjadi kendala.

### **3. Implementasi di SMP Islam**

Di SMP Islam Brawijaya, penerapan SPMI juga didasarkan pada siklus PPEPP. Proses dimulai dengan Evaluasi Diri Sekolah (EDS) untuk menilai delapan SNP. Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Sekolah (TPMPS) kemudian merancang rencana kerja sesuai hasil EDS. Namun, selama pandemi Covid-19, implementasi SPMI mengalami kendala akibat perubahan kebijakan yang fokus pada keselamatan siswa dan tenaga pengajar. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan SPMI tidak berjalan maksimal (Ula et al., 2021).

### **4. Implementasi di SMP Swasta**

SMP Muhammadiyah Al Mujahidin Gunung Kidul mengintegrasikan SPMI dengan sistem manajemen mutu ISO 9001, menerapkan standar kualitas yang lebih tinggi dibandingkan sekolah negeri. Proses penerapannya mencakup:

- a) Sosialisasi pentingnya SPMI kepada seluruh warga sekolah.
- b) Pelatihan bagi guru dan staf mengenai prosedur penjaminan mutu.
- c) Monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan semua proses pembelajaran sesuai standar mutu.

Keberhasilan implementasi di SMP Muhammadiyah terlihat dari peningkatan hasil belajar siswa dan tingkat kepuasan orang tua. Namun, salah satu tantangan utama

adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia agar pemahaman tentang SPMI merata di semua elemen sekolah (Rohmayanti, 2020).

## **5. Perbandingan Implementasi**

Terdapat perbedaan signifikan dalam pelaksanaan SPMI di ketiga jenis sekolah:

- a) SMP Negeri cenderung mengikuti regulasi pemerintah dengan lebih terstruktur, meski menghadapi tantangan dalam hal pemahaman staf.
- b) MTs Negeri memiliki kemampuan adaptasi terhadap kondisi eksternal seperti pandemi, namun efektivitasnya sempat menurun.
- c) SMP Swasta unggul dalam integrasi sistem mutu dengan standar lebih tinggi, tetapi perlu fokus pada peningkatan kapasitas staf agar tidak ada kesenjangan pemahaman.

## **6. Kesimpulan**

Penerapan SPMI di SMP dan MTs menunjukkan keberagaman efektivitas yang bergantung pada konteks dan jenis sekolah. Dengan mengelola tantangan masing-masing, implementasi prinsip mutu secara konsisten dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Evaluasi berkala dan umpan balik menjadi kunci bagi institusi untuk terus memperbaiki sistem dan mencapai hasil yang optimal.

## **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di SMP/MTs**

Penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu internal di satuan pendidikan menengah pertama pasti ada beberapa faktor-faktor yang mengikutinya, antara lain faktor pendukung dan faktor penghambat.

### **1. Faktor Pendukung**

Dalam pengimplementasian sistem penjaminan mutu internal di sekolah menengah pertama perlu ada adanya hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan peningkatan mutu (Handayani et al., 2024). Terdapat beberapa aspek penting, antara lain:

- a) Motivasi dan dukungan kepala sekolah

Kepala sekolah harus berkomitmen dengan mendorong para guru dan staf lainnya mencapai tujuan pendidikan terutama dalam memberikan arahan kepada tim penjaminan mutu sekolah. Motivasi kepala sekolah juga berpengaruh terhadap iklim pendidikan di sekolah sehingga mewujudkan suasana sekolah yang nyaman agar para guru dan siswa semangat dalam belajar.

- b) Sumber daya manusia

Pendidik, tenaga kependidikan, dan staf sekolah yang lainnya berperan penting terhadap keberhasilan sekolah. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang



berkualitas, terlatih, serta memiliki pengalaman tentunya mampu memberikan pengajaran yang efektif untuk mendukung pembelajaran, pengelolaan sekolah, dan menjalankan sistem penjaminan mutu di sekolah.

c) Fasilitas yang memadai

Fasilitas sekolah merupakan aspek penting mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Fasilitas yang baik seperti ruang kelas, perpustakaan laboratorium, dan alat-alat pembelajaran yang lengkap dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan berpengaruh terhadap prestasi siswa.

d) Kerjasama antar stakeholder

Sekolah perlu dukungan dan kerjasama dengan para stakeholder yang ada, seperti wali murid, masyarakat. Selain itu juga, para stakeholder dari luar sekolah seperti lembaga pendidikan, pemerintahan, organisasi non pemerintahan. Kerjasama dengan pihak luar dapat memberikan dampak positif seperti kerjasama, pengalaman, dan penghargaan. Kerjasama yang baik dengan para stakeholder dapat mempercepat pengambilan keputusan, menjalankan program peningkatan mutu, dan memastikan penjaminan mutu di sekolah mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak.

## 2. Faktor Penghambat

Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal di tingkat SMP telah menunjukkan hasil yang diharapkan. Namun, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala yang dapat memengaruhi implementasi sistem tersebut. Salah satu kendalanya adalah belum tersedianya ruang laboratorium IPA di beberapa sekolah, yang seharusnya menjadi fasilitas penting untuk mendukung proses pembelajaran. Akibatnya, praktik mata pelajaran IPA terpaksa dilakukan di kelas masing-masing. Selain itu, sekolah juga belum menyediakan fasilitas untuk mendukung pengembangan diri siswa dalam berorganisasi, seperti ruang khusus untuk OSIS dan pramuka. Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan juga masih menghadapi tantangan, karena masih terdapat guru yang mengajar mata pelajaran di luar bidang keahliannya, sehingga tidak sesuai dengan prinsip kelayakan atau kesesuaian keilmuan. Hal ini berdampak pada mutu pendidikan yang belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, pengelolaan perpustakaan sekolah masih ditangani oleh guru mata pelajaran, bukan oleh petugas yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang perpustakaan. Kondisi ini membuat para guru sering mengalami kesulitan pengelolaan perpustakaan dan jam mata pelajaran (Prasetya et al., 2022).

Terdapat beberapa faktor lain yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sistem penjaminan mutu di sekolah. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman dari tim penjaminan mutu dalam menyelaraskan program rencana pemenuhan mutu, rencana kerja, serta anggaran yang dimiliki sekolah. Selain itu, proses pemetaan mutu yang dilakukan secara online sering mengalami hambatan, terutama karena kendala jaringan internet dan banyaknya jumlah soal atau instrumen yang harus diisi. Hal ini menyebabkan pengisian kuesioner memerlukan waktu yang cukup lama. Jumlah instrumen yang terlalu banyak juga dapat menimbulkan kejenuhan, sehingga berpotensi menghasilkan jawaban yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. (Prasetya et al., 2022).

Faktor pendanaan juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan penjaminan mutu di beberapa sekolah. Keterbatasan anggaran sering kali menghalangi pelaksanaan berbagai program yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dana yang memadai dibutuhkan untuk mendukung berbagai kegiatan, seperti pelatihan guru, pengadaan sarana dan prasarana, serta program-program lainnya. Tanpa alokasi anggaran yang mencukupi, pelaksanaan sistem penjaminan mutu di sekolah sulit dilakukan secara optimal. Selain itu, lingkungan sekolah yang kurang kondusif juga menjadi faktor penghambat karena dapat memengaruhi motivasi belajar siswa dan kinerja guru. Lingkungan yang tidak mendukung menyebabkan proses pembelajaran serta pelaksanaan program peningkatan mutu tidak berjalan secara efektif. (Sammara & Hasbi, 2023). Selain itu ada beberapa hal lain yang menjadi pengambat (Pamelanintyas, 2019), antara lain:

a) Kurangnya pemahaman terkait program SPMI

Banyak pihak yang belum memahami tujuan dan mekanisme dari penjaminan mutu internal, seperti guru, tenaga kependidikan, maupun orang tua. Ini dapat terjadi karena sosialisasi program tidak efektif atau tidak menyentuh semua pihak yang terlibat. Akibatnya, pelaksana sering kali kurang memahami tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga implementasi menjadi tidak maksimal. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam pelaksanaan dan kurangnya komitmen terhadap program.

b) Sarana dan prasarana yang kurang memadai

Kekurangan fasilitas penunjang menjadi kendala dalam mendukung kegiatan evaluasi dan pelaksanaan program mutu seperti ruang kelas, alat evaluasi, bahan pendukung pembelajaran, teknologi, dan lainnya. Ini dapat menghambat pencapaian standar mutu yang telah ditetapkan. Kurangnya fasilitas akan berakibat pada pelaksanaan penjaminan mutu di sekolah tidak optimal.

c) Banyaknya program yang dijalankan

Sekolah sering kali dihadapkan pada berbagai program lain yang berjalan bersamaan, sehingga alokasi waktu dan sumber daya menjadi terbagi, yang pada akhirnya memengaruhi fokus dan efektivitas implementasi SPMI. Oleh karena itu, dengan adanya beban kerja yang tinggi bagi para guru dan tenaga kependidikan maka akan kesulitan memprioritaskan melaksanakan SPMI di sekolah. Akibatnya, kegiatan tersebut dilakukan hanya sebatas formalitas tanpa substansi yang memadai.

d) Waktu yang terbatas

Jadwal kegiatan sekolah yang padat menjadi sulit untuk melaksanakan kegiatan pemetaan, evaluasi, atau pelaksanaan program sesuai rencana yang telah disusun berkaitan dengan SPMI yang ada di sekolah. Kurangnya waktu akan menghambat beberapa tahapan penting dalam SPMI di satuan pendidikan sehingga menjadi terburu-buru bahkan terlewatkan.

e) Evaluasi dan tindak lanjut kurang diperhatikan

Evaluasi merupakan tahapan penting dalam SPMI untuk mengukur keberhasilan program dan menentukan langkah perbaikan. Namun, proses monitoring dan evaluasi sering kali tidak diikuti dengan tindakan lanjutan yang konkret untuk memperbaiki kekurangan. Hal ini menyebabkan program berjalan tanpa ada peningkatan signifikan dari tahun ke tahun dan tidak ada perbaikan konkret terhadap kekurangan yang ditemukan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP/MTs adalah dengan menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang berlandaskan pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kajian ini menunjukkan bahwa SPMI berfungsi untuk pengendalian mutu, membangun budaya mutu yang berkelanjutan di lingkungan pendidikan. Proses implementasi SPMI yang melibatkan tahapan Evaluasi Diri Sekolah (EDS), perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi telah terbukti dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, kinerja guru, dan kepuasan stakeholder pendidikan. SPMI berperan sebagai alat untuk memastikan kualitas pendidikan yang berkelanjutan melalui tahap PPEPP (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu). Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi SPMI memberikan dampak positif pada peningkatan mutu pembelajaran dan pengelolaan sekolah, dengan

dukungan dari kepala sekolah, guru, staf, serta pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai.

Namun, pelaksanaan SPMI di berbagai institusi pendidikan menghadapi tantangan yang signifikan, seperti kurangnya pemahaman terhadap program di kalangan staf, keterbatasan fasilitas, serta dukungan finansial yang tidak memadai. Di sisi lain, faktor pendukung seperti kepemimpinan kepala sekolah, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten memberikan dampak positif terhadap keberhasilan implementasi SPMI. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi SPMI dalam mencapai standar mutu pendidikan yang optimal, berikut beberapa rekomendasi yaitu peningkatan pemahaman program SPMI, meningkatkan kapasitas pendidik maupun tenaga kependidikan, optimalisasi fasilitas sekolah, penguatan kepemimpinan dan manajemen, kolaborasi stakeholder, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

## **6. UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang berkontribusi secara tidak langsung melalui karya-karya ilmiah dan literatur yang menjadi referensi utama dalam penyusunan artikel ini. Tulisan ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan berbagai referensi yang relevan, baik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, maupun dokumen kebijakan yang memberikan dasar teori, analisis, dan data empiris untuk memperkuat kajian literatur kami.

## **7. DAFTAR REFERENSI**

- Allo, A. K., Ansar, & Irmawati. (2022). Implementasi sistem penjaminan mutu internal di SMP Negeri 1 Labakkang. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 8(2), 933–944. <https://doi.org/10.37905/aksara.8.2.933-944.2022>
- Asriadi. (2022). Pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal dalam peningkatan mutu satuan pendidikan di SMP Negeri 3 Watansoppeng. 9, 356–363.
- Dewi, P., & Anwar, S. (2022). Sistem penjaminan mutu internal di SMP Negeri 16 Kaur. *Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana*, 16(2), 30–39. <https://doi.org/10.33369/mapen.v16i2.23111>
- Handayani, L., Juwita, J., Afriansyah, A., & Sariakin, S. (2024). Peningkatan mutu pendidikan melalui implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan di SMP

Negeri 5 Meureubo Aceh Barat. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(5), 2135–2144. <https://doi.org/10.38035/rrj.v6i5.1066>

Kemdikbud. (2016). *Permendikbud No. 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah*. Kemdikbud, 1–18.

Labakkang, N., & Allo, A. K. (2024). Implementasi sistem penjaminan mutu internal di SMP. *Implementation of an Internal Quality Assurance System at SMP Negeri 1 Labakkang, September*, 2541–2555.

Pamelanintyas, R. (2019). Implementasi program sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di SMP Negeri 8 Yogyakarta. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 8(3), 230. <https://doi.org/10.21831/sakp.v8i3.15864>

Prasetya, D. B., Radiana, U., Junanto, T., & Mening, H. (2022). Implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam peningkatan mutu pendidikan di SMP Kristen Bukit Pengharapan Kabupaten Sanggau. *Multiverse*, 1(2), 51–58.

Rohmayanti, L. (2020). Implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di SMP Muhammadiyah Al Mujahidin Gunung Kidul Yogyakarta (Doctoral dissertation). IAIN Purwokerto, 137.

Sammara, R., & Hasbi. (2023). Implementasi sistem penjaminan mutu pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. *Journal of Islamic Education Management*, 8(1), 45–46. <https://doi.org/10.1177/22308075231155232>

Sukaryanti, B. (2020). Manajemen sekolah model sistem penjaminan mutu internal di SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta. *Media Manajemen Pendidikan*, 2(3), 362. <https://doi.org/10.30738/mmp.v2i3.6739>

Supadi. (2020). *Manajemen mutu pendidikan*. UNJ Press.

Suradnya, I. N. (2021). Penerapan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di SMP Negeri 1 Banjarangkan. *MANAGERIAL: Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 1(1), 8–17. <https://jurnalp4i.com/index.php/manajerial/article/view/226>

Toliu, Z., Arsyad, A., & Lamatenggo, N. (2022). Sistem penjaminan mutu internal untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Bolangitang Barat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(2), 1349–1358.

Ula, H., Yunus, M., & Bakar, A. (2021). Implementasi sistem penjaminan mutu internal (SPMI) pada masa pandemi Covid-19 di sekolah menengah pertama. *Website: Journal*, 7(2), 2503–3506.

Warta, W., Sulastriningsih, K., & Umronih, D. (2024). Implementasi sistem penjaminan mutu internal dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan. *Technomedia Journal*, 9(1), 53–60. <https://doi.org/10.51729/5211>